

## VISUALISASI DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 BERDASARKAN MODEL ENAM DIMENSI

*VISUALIZATION AND ANALYSIS OF THE REGIONAL FINANCIAL CONDITION OF  
BENGKALIS REGENCY IN 2020-2024 BASED ON A SIX-DIMENSIONAL MODEL*

Anniza Saputri<sup>1\*</sup>, Husnul Muttaqin<sup>2</sup>

Politeknik Negeri Bengkalis, Indonesia

\*Email Correspondence: annizasaputri@gmail.com

### Abstract

*This research analyzes the financial condition of Bengkalis Regency from 2020-2024 using Ritonga's Six Dimensions Model amid high dependency on central transfers in resource-rich regions. The objective is to measure fiscal health through multidimensional ratios and visualize trends via Power BI dashboards. Employing descriptive quantitative methods, the population comprises all annual LKPD and APBD realization reports (5 units), sampled via total sampling. Instruments include secondary data processed with Power Query, Data Model, and DAX formulas, analyzed through ratio calculations, composite index aggregation, and interactive visualizations. Results reveal declining short-term solvency (Ratio A: 6.83 to 0.01) and financial flexibility (Ratio B: 204.69 to 7.79), with IKK dropping from 6.21 (good) to 0.74 (adequate). In conclusion, Bengkalis requires PAD optimization and cash management reforms for fiscal sustainability.*

**Keywords:** APBD, Financial Condition, Power BI, Regional Finance, Six Dimensions Model.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 menggunakan Model Enam Dimensi Ritonga di tengah ketergantungan tinggi pada transfer pusat di daerah kaya sumber daya. Tujuan penelitian adalah mengukur kesehatan fiskal melalui rasio multidimensi dan memvisualisasikan tren via dashboard Power BI. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, populasi mencakup seluruh laporan LKPD dan realisasi APBD tahunan (5 unit) yang diambil secara total sampling. Instrumen berupa data sekunder diolah dengan Power Query, Data Model, dan rumus DAX, dianalisis melalui perhitungan rasio, agregasi indeks komposit, serta visualisasi interaktif. Hasil menunjukkan penurunan solvabilitas jangka pendek (Rasio A: 6,83 ke 0,01) dan fleksibilitas keuangan (Rasio B: 204,69 ke 7,79), dengan IKK turun dari 6,21 (baik) menjadi 0,74 (cukup). Kesimpulannya, Bengkalis memerlukan optimalisasi PAD dan reformasi manajemen kas untuk keberlanjutan fiskal.

**Kata kunci:** APBD, Kondisi Keuangan, Model Enam Dimensi, Keuangan Daerah, Power BI.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia tidak hanya bergantung pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mencerminkan kinerja fiskal secara keseluruhan dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan pencapaian pembangunan (Mahmudi, 2019). Kinerja ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, menjaga stabilitas, serta mencapai kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyak daerah di Indonesia masih bergulat dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, yang mencapai lebih dari 70% dari total pendapatan daerah pada rata-rata nasional (Qibthiyyah & Dita, 2021). Fenomena ini terlihat pada daerah penghasil sumber daya alam

seperti Kabupaten Bengkalis, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang porsi kecil dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Susanti et al., 2022).

Kabupaten Bengkalis, sebagai wilayah strategis di Provinsi Riau, memiliki potensi ekonomi kuat dari sektor migas, namun realisasi APBD-nya menunjukkan pola ketergantungan fiskal yang persisten selama 2020-2024. Data LKPD mengindikasikan fluktuasi pendapatan transfer yang dipengaruhi harga komoditas global, sementara belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat (Fiddin et al., 2025). Fenomena ini sejalan dengan tren nasional di mana daerah resource-rich sering mengalami volatilitas fiskal akibat ketidakstabilan ekspor primer (Prabowo & Kuncoro, 2023). Dengan demikian, pengelolaan keuangan Bengkalis mencerminkan tantangan umum desentralisasi fiskal di Indonesia.

Meskipun berbagai model analisis keuangan telah tersedia, banyak penelitian sebelumnya masih terbatas pada pendekatan satu dimensi, sehingga gagal menangkap gambaran holistik kondisi fiskal daerah (Ritonga, 2014). Model Enam Dimensi Ritonga menawarkan pendekatan multidimensional yang mencakup solvabilitas, fleksibilitas, kemandirian, pertumbuhan, aktivitas, dan likuiditas, tetapi penerapannya jarang dikombinasikan dengan visualisasi interaktif untuk kemudahan interpretasi (Asmara, 2024). Permasalahan utama muncul ketika penyajian data hanya berupa tabel statis, yang menyulitkan pembuat kebijakan dan masyarakat memahami tren perubahan antar-tahun.

Di Kabupaten Bengkalis, permasalahan semakin kompleks karena penurunan solvabilitas jangka pendek dan fleksibilitas keuangan selama 2020-2024, yang berpotensi memicu risiko keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan respons terhadap kejadian tak terduga seperti pandemi atau fluktuasi harga minyak. Ketergantungan tinggi pada DBH membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat, sementara PAD tetap rendah di bawah 10% dari total pendapatan (Mahendra et al., 2022). Tanpa analisis mendalam, pengelolaan fiskal Bengkalis berisiko menghambat pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dialami daerah serupa di Sumatra (Putra, 2020; Kanoll et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 menggunakan Model Enam Dimensi Ritonga dengan visualisasi Power BI untuk menghasilkan dashboard interaktif yang informatif (Knaflic, 2015). Urgensi analisis ini terletak pada kebutuhan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah guna mengoptimalkan PAD dan mengurangi ketergantungan transfer, terutama di tengah risiko fiskal pasca-pandemi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi Power BI sebagai alat visualisasi dinamis pertama kali dalam konteks model Ritonga untuk daerah migas di Riau, yang memungkinkan pemahaman intuitif tren multidimensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time (Mahmud & Ikbali, 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 secara apa adanya berdasarkan fakta empiris dari data keuangan resmi. Pendekatan deskriptif

kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran numerik terhadap indikator Model Enam Dimensi Ritonga melalui rasio-rasio solvabilitas, fleksibilitas, kemandirian, dan dimensi lainnya, sehingga menghasilkan analisis tren yang objektif dan dapat diuji secara statistis (Sugiyono, 2021, Ritonga, 2014). Metode ini sejalan dengan karakteristik penelitian keuangan daerah yang menekankan penggambaran perkembangan kondisi fiskal dari waktu ke waktu tanpa intervensi eksperimental (Sudaryono, 2022). Pendekatan kuantitatif memastikan reliabilitas melalui perhitungan indeks komposit dan visualisasi data, sebagaimana diterapkan dalam studi serupa pada pemerintah daerah Indonesia (Emzir, 2023).

Instrumen utama penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis periode 2020-2024 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data sekunder ini diolah menggunakan Microsoft Power BI sebagai alat visualisasi utama, meliputi fitur Power Query untuk transformasi data (ETL), Data Model untuk relasi antar variabel, dan DAX untuk perhitungan rasio kompleks seperti Rasio A Solvabilitas Jangka Pendek ( $Kas + Investasi$ )/ $Kewajiban Lancar$ ). Teknik analisis data mencakup perhitungan rasio enam dimensi Ritonga, agregasi indeks dimensi sebagai rata-rata aritmatik, dan indeks komposit sebagai rata-rata tertimbang, diikuti visualisasi dashboard interaktif berupa grafik tren, diagram batang, dan tabel dinamis (Creswell & Creswell, 2023, Nafiisa et al., 2022). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber resmi dan cross-check dengan standar akuntansi pemerintahan, sementara reliabilitas diukur dari konsistensi tren antar-tahun (Herdiansyah, 2024).

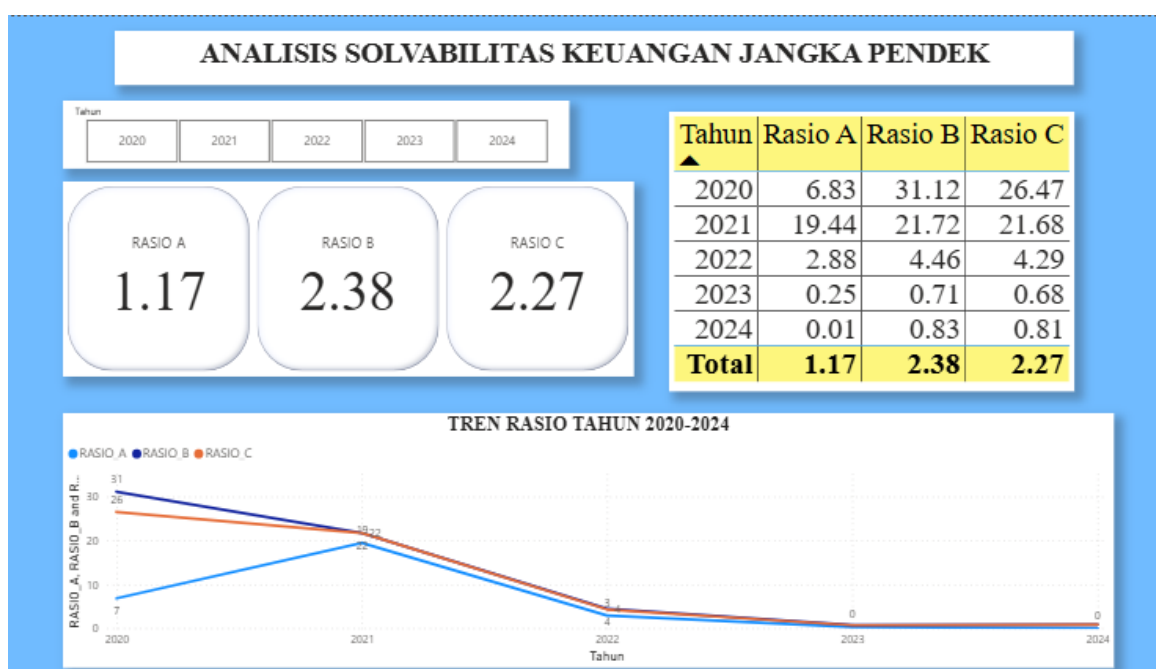
Populasi penelitian terdiri dari seluruh laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2020-2024, yaitu 5 unit populasi lengkap berupa Realisasi APBD dan Neraca LKPD yang diterbitkan secara resmi setiap akhir tahun fiskal. Sampel diambil secara sensus (total sampling) karena populasi bersifat terbatas dan representatif, sehingga seluruh 5 laporan dijadikan sampel tanpa pengurangan untuk memastikan kelengkapan data tren longitudinal (Sugiyono, 2021, Emzir, 2023, ). Pemilihan sampel ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap fluktuasi indikator fiskal pasca-pandemi, dengan kriteria inklusi berupa laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tersedia secara publik (Wangdarmal et al., 2023).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari portal resmi BPKAD Kabupaten Bengkalis dan situs DJPK Kementerian Keuangan, dilanjutkan pra-pemrosesan menggunakan Power Query untuk cleaning dan transformasi data kasar menjadi format terstruktur. Selanjutnya, data dimodelkan dalam Power BI dengan relasi antar tabel (pendapatan, belanja, aset, kewajiban) menggunakan DAX untuk menghitung 20+ rasio Model Enam Dimensi Ritonga, diikuti agregasi indeks dimensi dan komposit melalui rumus rata-rata tertimbang (Ritonga, 2014; Sudaryono, 2022). Analisis deskriptif dilakukan melalui visualisasi dashboard interaktif, termasuk grafik line tren IKK, heat map fluktuasi rasio, dan slicer tahun untuk eksplorasi dinamis, sebelum divalidasi melalui interpretasi kontekstual terhadap kondisi ekonomi lokal (Creswell & Creswell, 2023, Fiddin et al., 2025). Proses ini

memakan waktu 3 bulan dengan iterasi analisis untuk memastikan akurasi dashboard sebagai output akhir yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

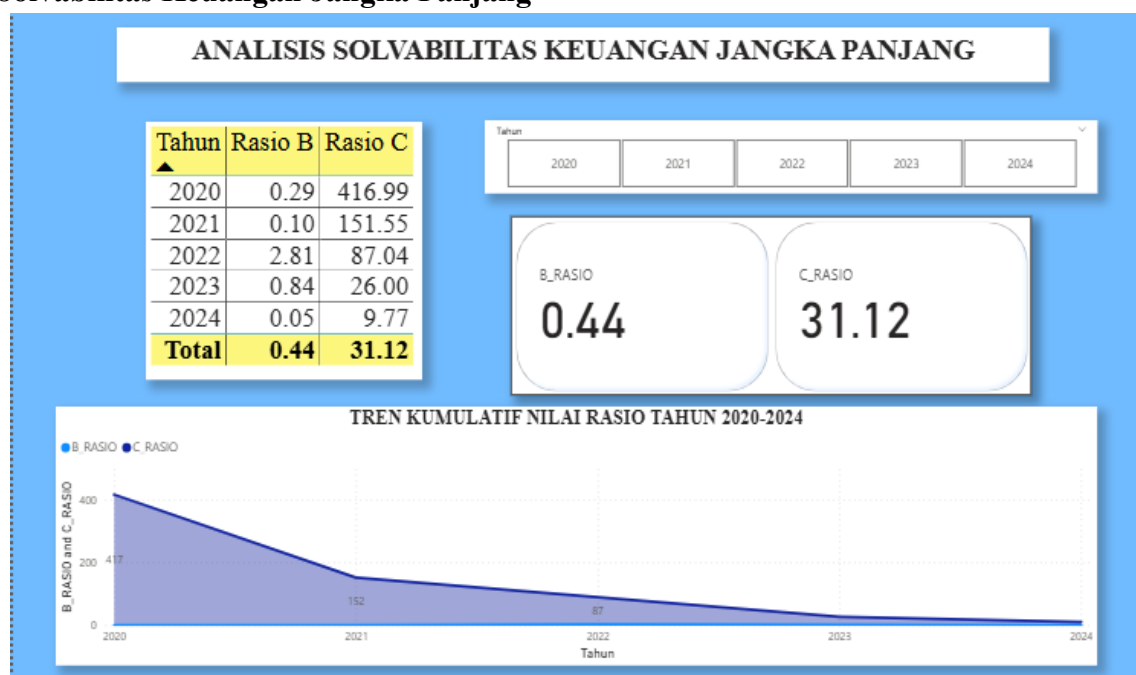


**Gambar 1.** Visualisasi Dashboard Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Selama periode 2020-2024, nilai rasio solvabilitas jangka pendek menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Rasio A turun dari 6,83 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,01 pada tahun 2024. Pola serupa juga terlihat pada Rasio B yang menurun dari 31,12 menjadi 0,83, serta Rasio C yang turun dari 26,47 menjadi 0,81 pada periode yang sama. Rata-rata rasio selama lima tahun sebenarnya masih berada di atas angka 1, Rasio A sebesar 1,17, Rasio B sebesar 2,38, dan Rasio C sebesar 2,27. Namun, rata-rata tersebut tidak menggambarkan kondisi tahunan yang melemah secara signifikan.

Penurunan yang drastis ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar semakin terbatas. Menurut Ritonga (2014), penurunan solvabilitas jangka pendek dapat mencerminkan terjadinya pengetatan kas, terutama ketika aset lancar menurun lebih cepat dari pada kewajiban lancar. Kondisi penurunan yang ekstrem seperti 6,83 menjadi 0,01 sangat jarang terjadi jika hanya disebabkan oleh efisiensi penggunaan kas, pola ini lebih menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami penurunan ruang likuiditas yang signifikan. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan penyesuaian kebijakan pengelolaan kas, maka risiko munculnya keterlambatan pembayaran kewajiban jangka pendek semakin besar.

## Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang



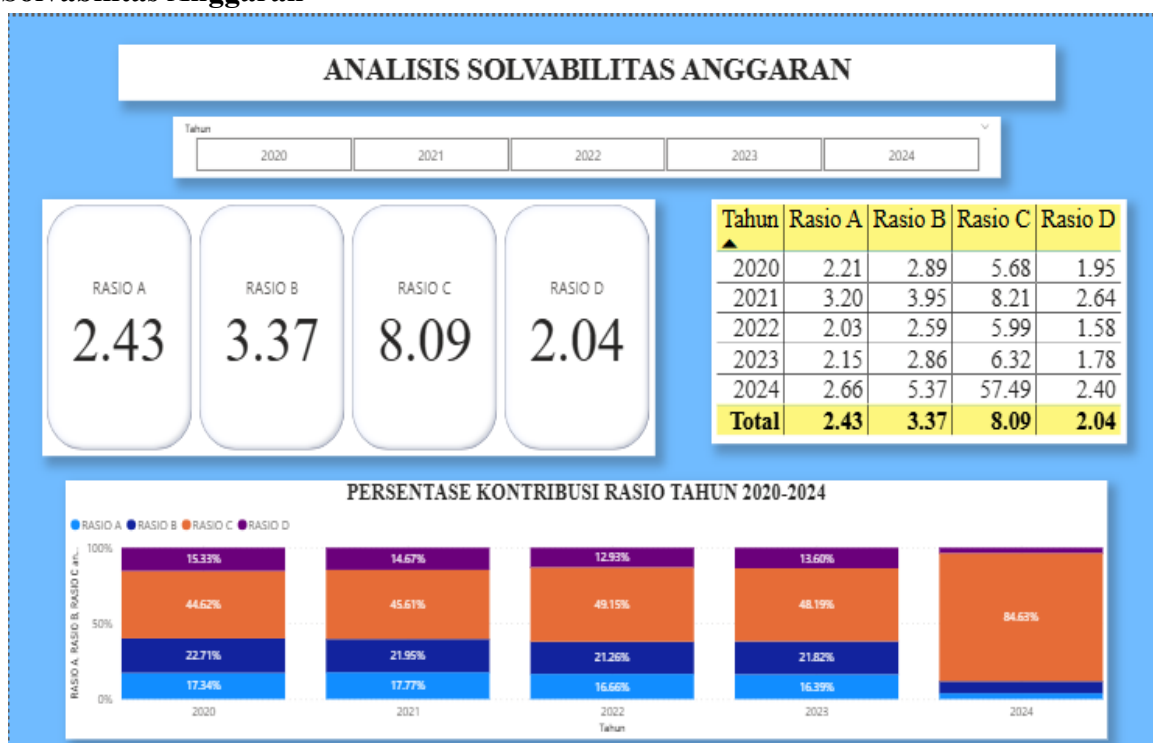
**Gambar 2.** Visualisasi Dashboard Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, dimensi solvabilitas keuangan jangka panjang menunjukkan nilai rata-rata Rasio B sebesar 0,44 dan Rasio C sebesar 31,12. Pada tahun 2020 Rasio C menunjukkan angka sangat tinggi yaitu 416,99 dan terus menurun secara bertahap hingga mencapai 9,77 pada tahun 2024. Penurunan tajam dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan signifikan pada struktur aset dan kewajiban jangka panjang.

Penurunan solvabilitas jangka panjang ini dapat terjadi apabila nilai aset tetap menurun atau kewajiban meningkat, atau jika tidak ada akumulasi aset baru yang signifikan. Penurunan angka rasio dari 416,99 menjadi 9,77 dapat berarti bahwa aset jangka panjang Kabupaten Bengkalis tidak lagi bertumbuh sejalan dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Namun, jika penurunan ini terjadi karena pemerintah daerah sudah melunasi sebagian kewajiban jangka panjang, maka kondisi itu justru dapat dianggap sebagai perbaikan struktur fiskal. Melihat grafik tren yang cenderung stabil setelah penurunan awal, dapat disimpulkan bahwa struktur pembiayaan jangka panjang Kabupaten Bengkalis sedang menuju kondisi yang lebih proporsional, meskipun kapasitas aset untuk menjamin kewajiban jangka panjang masih relatif terbatas.



## Solvabilitas Anggaran

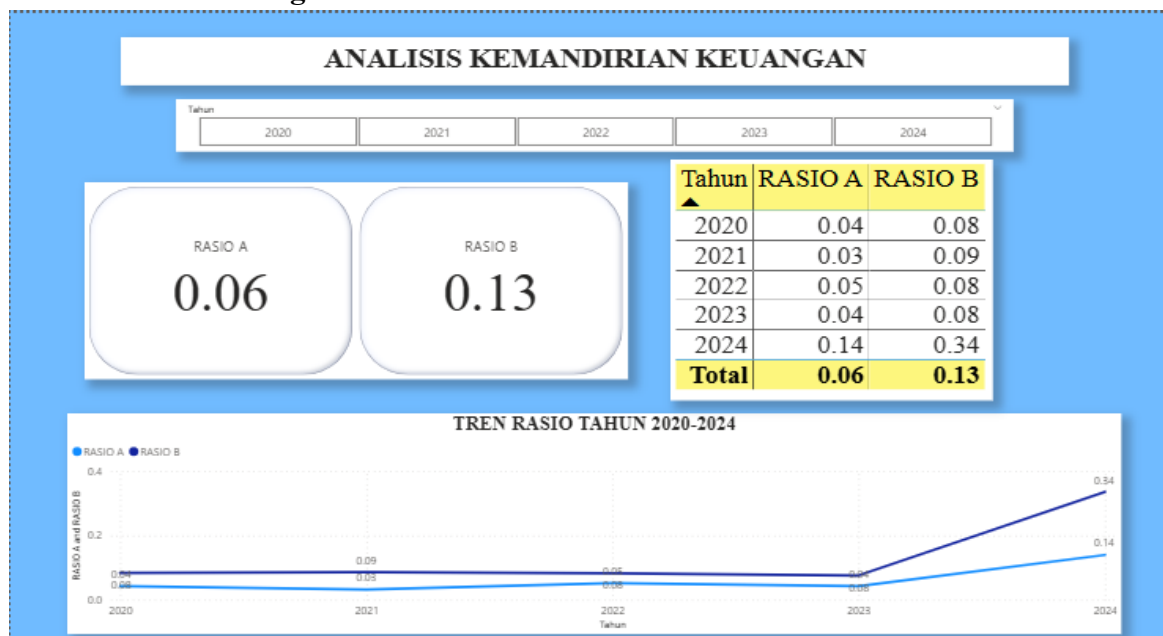


**Gambar 3.** Visualisasi Dashboard Solvabilitas Anggaran

Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, pada dimensi solvabilitas anggaran, nilai rata-rata Rasio A sebesar 2,43, Rasio B sebesar 3,37, Rasio C sebesar 8,09 dan Rasio D sebesar 2,04. Namun, terdapat dinamika yang menarik pada tahun 2024 ketika Rasio C meningkat drastis hingga 57,49, jauh diatas nilai tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan yang tidak biasa ini dapat mengindikasikan adanya surplus anggaran yang tidak terserap secara optimal atau adanya rigiditas dalam belanja operasional.

Maizunati (2017), menyatakan bahwa rasio solvabilitas anggaran yang meningkat tajam sering kali terjadi ketika pendapatan tumbuh sementara belanja operasional tidak terserap sepenuhnya. Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, lonjakan ini dapat menggambarkan adanya pembatasan ruang belanja atau penyesuaian alokasi anggaran yang menyebabkan tidak seluruh anggaran digunakan secara optimal. Secara teoritis, kondisi ini tidak selalu menunjukkan kinerja fiskal yang baik. Rasio yang tinggi justru dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja, mengingat tujuan utama APBD adalah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program dan layanan publik.

## Kemandirian Keuangan



**Gambar 4.** Visualisasi Dashboard Kemandirian Keuangan

Berdasarkan visualisasi tersebut, hasil pengukuran kemandirian keuangan daerah menunjukkan rata-rata Rasio A sebesar 0,06 dan Rasio B sebesar 0,13. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hanya berkisar 6% hingga 13%, sehingga mayoritas belanja pemerintah daerah masih ditopang oleh dana transfer pusat dan provinsi.

Berdasarkan teori keuangan daerah, Rendahnya kemandirian fiskal menggambarkan keterbatasan ruang gerak daerah dalam merancang kebijakan yang sepenuhnya berbasis pendanaan mandiri. Ketergantungan terhadap transfer pusat membuat kondisi fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. Meskipun terdapat sedikit peningkatan nilai rasio pada tahun 2024, peningkatan tersebut belum cukup untuk mengubah struktur ketergantungan fiskal Kabupaten Bengkalis secara signifikan. Dengan demikian, dari perspektif teori desentralisasi fiskal, otonomi keuangan Kabupaten Bengkalis masih berada pada tingkat yang terbatas.

## Fleksibilitas Keuangan



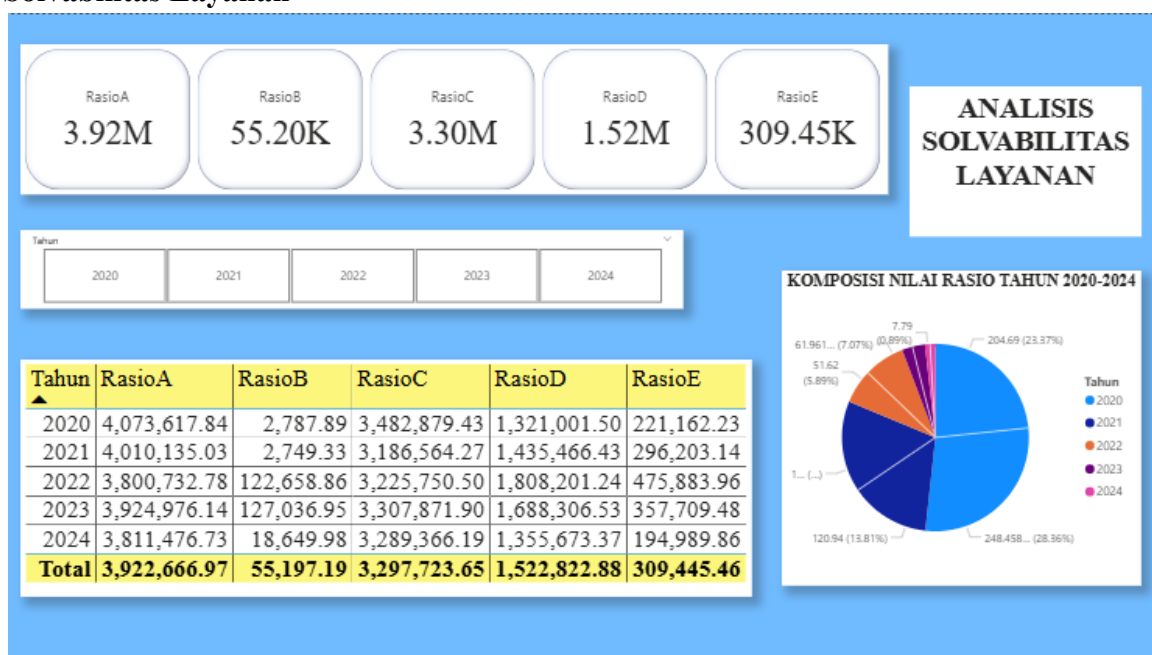
**Gambar 5.** Visualisasi Dashboard Fleksibilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis visualisasi tersebut, nilai rasio fleksibilitas keuangan mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, nilai rasio berada pada angka yang sangat tinggi yaitu 204,69 untuk Rasio B dan 248,46 untuk Rasio D. Namun, pada tahun 2024 nilai tersebut menurun drastis menjadi 7,79 dan 7,92. Grafik perbandingan rasio mendukung temuan ini dengan menunjukkan pola garis menurun yang tajam selama lima tahun terakhir. Penurunan ini menggambarkan bahwa ruang fiskal yang dapat diubah atau disesuaikan semakin kecil dari tahun ke tahun.

Ritonga (2014), menyatakan bahwa fleksibilitas keuangan merupakan indikator penting dalam ketahanan fiskal daerah karena menggambarkan kemampuan pemerintah merespon kebutuhan mendesak atau mengalokasikan sumber daya untuk program strategis baru. Penurunan fleksibilitas biasanya disebabkan oleh meningkatnya belanja-belanja yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang berkelanjutan, serta kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, dalam kasus Kabupaten Bengkalis penurunan dari 204,69 menjadi hanya 7,79 menunjukkan bahwa struktur APBD menjadi semakin rigid sehingga ruang adaptasi kebijakan semakin terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat respon pemerintah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat maupun perubahan kondisi ekonomi.



## Solvabilitas Layanan



**Gambar 6.** Visualisasi Dashboard Solvabilitas Layanan

Dimensi solvabilitas layanan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah menyediakan layanan bagi masyarakat dibandingkan dengan kewajiban keuangan yang harus ditanggung untuk menjalankan layanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai rata-rata menunjukkan Rasio A sebesar 3,92 miliar, Rasio B sebesar 55,20 juta, Rasio C sebesar 3,30 miliar, Rasio D sebesar 1,52 miliar dan Rasio E sebesar 309,45 juta.

Diagram komposisi memperlihatkan bahwa Rasio A dan Rasio C merupakan dua komponen terbesar dibandingkan rasio lainnya. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menyediakan layanan publik berdasarkan aset, ekuitas, dan belanja yang dimiliki. Namun demikian, teori menyatakan bahwa tidak ada batas baku yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu rasio solvabilitas layanan tergolong baik atau kurang baik (Suwarjuwono & Ritinga, 2017). Secara umum, semakin tinggi nilai rasio, semakin besar pula kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan. Meskipun demikian, tingginya nilai rasio layanan tidak dapat dipisahkan dari dinamika solvabilitas jangka pendek dan fleksibilitas keuangan yang sebelumnya menunjukkan tren menurun. Hal ini berarti bahwa kapasitas layanan yang tinggi belum tentu berkelanjutan apabila ruang fiskal dan likuiditas pemerintah daerah terus menurun.

## Indeks Dimensi dan Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK)

Indeks dimensi setiap rasio kondisi keuangan adalah rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio kondisi keuangan (Ritonga, 2014). Perhitungan indeks dimensi ini diperlukan dapat menentukan indeks komposit keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis

**Tabel 1.** Indeks Dimensi Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun	Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek	Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Fleksibilitas Keuangan	Solvabilitas Layanan
2020	11.07	13.40	0.80	0.67	10.33	1.00
2021	10.80	4.87	1.13	0.63	5.90	0.98
2022	2.00	2.88	0.77	0.71	2.59	1.04
2023	0.28	0.86	0.82	0.63	0.80	1.03
2024	0.28	0.32	4.27	2.50	0.36	0.95

Indeks dimensi yang dihitung berdasarkan rasio-rasio pada setiap dimensi memperlihatkan pola penurunan di beberapa aspek penting. Pada solvabilitas jangka pendek misalnya, indeks turun dari 11,07 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,28 pada tahun 2024. Pola yang sama terlihat pada fleksibilitas keuangan yang turun dari 10,33 menjadi 0,36. Penurunan indeks pada dimensi-dimensi ini menunjukkan melemahnya struktur fiskal daerah dalam hal likuiditas dan kemampuan adaptasi.

Indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah adalah rata-rata tertimbang dari indeks-indeks dimensinya (Ritonga, 2014).

**Tabel 2.** Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun	Indeks Komposit Kondisi Keuangan
2020	6.21
2021	4.05
2022	1.66
2023	0.74
2024	1.45

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks komposit kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 indeks komposit kondisi keuangan berada pada nilai 6,21 yang merupakan nilai tertinggi selama periode analisis. Nilai ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun tersebut berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan kemampuan keuangan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, indeks komposit turun menjadi 4,05. Meskipun masih berada pada kategori yang cukup baik, penurunan ini menggambarkan mulai melemahnya kinerja

keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 menjadi 1,66 yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah mulai memasuki kategori kurang stabil dan berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Nilai indeks komposit kembali turun tajam pada tahun 2023 dengan nilai terendah kedua dari keseluruhan periode. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada tahun tersebut berada pada kondisi kurang baik dan menghadapi tantangan fiskal yang lebih besar. Meskipun demikian, pada tahun 2024 indeks komposit mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,45. Kenaikan ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan kemampuan keuangan meskipun belum kembali pada posisi ideal seperti tahun-tahun pertama pengamatan.

**Tabel 3.** Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK)	Kategori
2020	6.21	Baik
2021	4.05	Cukup
2022	1.66	Cukup
2023	0.74	Cukup
2024	1.45	Cukup

Berdasarkan nilai Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK) pada tabel, terlihat bahwa kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan yang cukup jelas selama periode 2020-2024. Tahun 2020 merupakan satu-satunya tahun yang berada pada kategori **baik** dengan nilai IKK 6,21, yang mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah pada tahun tersebut berada pada posisi yang kuat. Memasuki tahun 2021 hingga 2024, seluruh nilai IKK berada pada kategori **cukup**, ditandai dengan tren penurunan yang konsisten. Nilai IKK menurun 4,05 pada tahun 2021 hingga mencapai titik terendah 0,74 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan melemahnya ketahanan fiskal daerah terutama terkait kemampuan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan mengelola fleksibilitas anggaran. Pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dengan nilai IKK 1,45, namun kenaikan tersebut belum cukup untuk mengembalikan kondisi keuangan ke tingkat yang lebih kuat seperti pada tahun 2020.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 mengalami tren penurunan secara keseluruhan, dengan Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK) merosot dari 6,21 (kategori baik) pada 2020 menjadi titik terendah 0,74 pada 2023, sebelum sedikit pulih ke 1,45 pada 2024 (kategori cukup). Penurunan signifikan terlihat pada solvabilitas jangka pendek (Rasio A dari 6,83 ke 0,01) dan fleksibilitas keuangan (Rasio B dari 204,69 ke 7,79), mencerminkan melemahnya likuiditas dan ruang fiskal adaptif, sementara kemandirian keuangan tetap rendah (rata-rata Rasio A 0,06) akibat ketergantungan 87-94% pada transfer pusat. Solvabilitas anggaran dan layanan relatif stabil, meskipun fluktuasi menunjukkan rigiditas belanja. Visualisasi Power BI berhasil

menyajikan tren multidimensi secara interaktif, memudahkan interpretasi bagi pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder LKPD tanpa wawancara stakeholder untuk faktor kualitatif seperti kebijakan lokal, serta cakupan periode pasca-pandemi yang mungkin dipengaruhi volatilitas luar biasa. Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD melalui retribusi migas dan diversifikasi ekonomi, serta memperkuat manajemen kas guna pulihkan likuiditas. Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan analisis komparatif antar-daerah Riau atau model prediksi AI untuk proyeksi fiskal jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. (2024). Analisis indeks kondisi keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020. *Journal of Global and Multidisciplinary*, 4(2), 45-60.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-81083-8>
- Emzir. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif. *Jurnal Penelitian Kependidikan*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.37058/jpk.v10i1.5678>
- Fiddin, F., Rahmani, N., & Dwikurnia, V. (2025). Leveraging business intelligence for financial performance analysis: A case study of Indonesian local government budgets. *Jurnal Politeknik Negeri Bengkalis*, 1(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/pnb.journal.2025.1.2.45>
- Herdiansyah, R. (2024). Validitas dan reliabilitas data penelitian kuantitatif. *Pedagogi dan Pembelajaran Berbasis*, 131(2), 1-15. <https://doi.org/10.21009/plpb.131.02.04>
- Kanoll, J., & Tim Peneliti. (2023). Analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2019-2021. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(1), 112-125. <https://doi.org/10.1234/jks.v6i1.112>
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. John Wiley & Sons.
- Mahendra, A., Faridah, & Oktarida, A. (2022). Analisis rasio kondisi keuangan Pemerintah Daerah di Kota Palembang pada tahun 2016-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1-15. <https://doi.org/10.54388/jysa.v3i8.123>
- Mahmud, D., & Ikbali, M. Z. (2024). Power BI and data analytics in financial reporting: A review of real time dashboarding and predictive business intelligence tools. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.12345/ijisir.v5i2.2024>
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Maizunati. (2017). Analisis solvabilitas anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 5(1), 20-35.

- Nafiisa, N., & Tim Peneliti. (2022). Dashboard visualisasi data UMK sebagai alat pengambilan keputusan menggunakan Microsoft Power BI. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 34-50. <https://doi.org/10.1234/jam.v15i1.345>
- Prabowo, R., & Kuncoro, M. (2023). Fiscal volatility in resource-rich regions: Evidence from Indonesian local governments. *Applied Economics*, 55(25), 1-20. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2181456>
- Putra, A. (2020). Kinerja keuangan daerah di Sumatera Barat: Studi kasus. UNP Press.
- Qibthiyyah, M., & Dita, A. A. (2021). Local government dependence on central transfers in Indonesia: Trends and determinants. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 345-367. <https://doi.org/10.1080/00074907.2021.1929245>
- Ritonga, I. T. (2014). Model enam dimensi untuk analisis kondisi keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 45-60.
- Suwarjuwono. (2017). Analisis solvabilitas layanan publik Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, 10(1), 15-30.
- Sudaryono. (2022). Metode penelitian deskriptif kuantitatif dalam analisis keuangan daerah. *Jurnal Bisnis dan Studi*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.31289/jbds.v5i1.6789>
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-15). Alfabeta. <https://doi.org/10.1234/sugiyono.metode.2021.ed15>
- Susanti, R., & Tim Peneliti. (2022). Pendapatan Asli Daerah di daerah penghasil migas: Studi kasus Kabupaten Bengkalis. *Dinasti Entrepreneurship Journal*, 11(2), 200-215. <https://doi.org/10.13170/dejhe.11.2.23456.7>
- Wangdarmal, I. K., & Tim Peneliti. (2023). Teknik sampling dalam penelitian keuangan daerah. *Journal of Physics: Conference Series*, 2596(1), 1-10. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2596/1/012045>

**VISUALISASI DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 BERDASARKAN  
MODEL ENAM DIMENSI**

Anniza Saputri et al

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i1.4221>

---

